Implikasi Yuridis Presidential Threshold Dalam Pemilu Presiden Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat

Muhsin*¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

*e-mail: uchein.inhil@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum presiden di Indonesia terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menelaah ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan pandangan akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa presidential threshold membatasi hak politik warga negara dan menghambat prinsip keterwakilan yang adil dalam pemilihan umum. Kebijakan ini cenderung memperkuat dominasi oligarki politik, menutup akses partai kecil untuk mencalonkan presiden, serta membatasi pilihan rakyat dalam proses elektoral. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui threshold sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, banyak pandangan yang menyatakan bahwa penerapannya bertentangan dengan semangat demokrasi inklusif dan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, keberadaan presidential threshold dinilai perlu ditinjau ulang agar sistem pemilu di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang adil, partisipatif, dan menjamin kesetaraan hak setiap warga negara. Reformulasi kebijakan ini menjadi penting dalam rangka memperkuat legitimasi pemilu dan memperluas ruang partisipasi politik rakyat secara konstitusional.

Kata kunci: Presidential threshold, kedaulatan rakyat, pemilu, konstitusi, demokrasi

Abstract

This study aims to analyze the juridical implications of implementing the presidential threshold in Indonesia's presidential elections on the principle of popular sovereignty as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Using a normative juridical approach and literature review method, this research examines Article 222 of Law Number 7 of 2017 along with relevant Constitutional Court decisions and academic perspectives. The findings indicate that the presidential threshold restricts citizens' political rights and undermines fair representation in the electoral process. This policy tends to strengthen political oligarchy, limiting smaller parties from nominating presidential candidates and narrowing the public's choices in elections. Although the Constitutional Court has upheld the threshold as a matter of open legal policy, many scholars argue that its implementation contradicts the spirit of inclusive democracy and the core principle of popular sovereignty. Therefore, the existence of the presidential threshold should be reconsidered to ensure that Indonesia's electoral system reflects democratic values that are fair, participatory, and uphold the equal political rights of every citizen. Reformulating this policy is essential to strengthen electoral legitimacy and broaden constitutional political participation.

Keywords: Presidential threshold, popular sovereignty, election, constitution, democracy

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam hal ini, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Namun, penerapan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan kontroversi yang signifikan dalam ranah hukum dan politik nasional.

Presidential threshold menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis karena membatasi hak partisipasi politik warga

negara dan partai politik baru, serta dinilai tidak sejalan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Menurut Boediningsih (2023), kebijakan threshold telah mempersempit ruang demokrasi dan mengabaikan esensi dari kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia, di mana pencalonan seharusnya terbuka dan inklusif terhadap berbagai kekuatan politik yang sah di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Hapsari & Saraswati (2023) yang menunjukkan bahwa threshold menciptakan monopoli politik oleh partai-partai besar dan membatasi hak konstitusional warga negara.

Kajian yuridis terhadap presidential threshold menjadi sangat penting karena menyangkut legitimasi hukum dan konstitusionalitas kebijakan tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan konstitusional menunjukkan bahwa penerapan threshold tidak memiliki landasan langsung dalam konstitusi, serta menimbulkan ketimpangan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif (Sayogo, 2018; Antamaeng, 2019).

Lebih lanjut, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah menguatkan keberlakuan ketentuan ini, namun tetap menuai kritik tajam dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil karena dianggap menghambat regenerasi kepemimpinan dan mempersempit pilihan rakyat dalam memilih pemimpin nasional (Fathurrahman, 2024; Wijaya & Erwinta, 2020).

Dengan demikian, perlu dilakukan analisis yuridis secara mendalam untuk mengkaji implikasi ketentuan presidential threshold terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Kajian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman hukum yang komprehensif, tetapi juga membuka ruang pembaharuan hukum pemilu yang lebih adil, demokratis, dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan tinjauan pustaka (*literature review*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan mengenai presidential threshold dan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan dan keputusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 53/PUU-XV/2017. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan seperti jurnal hukum, artikel akademik, tesis, dan skripsi dari berbagai universitas yang membahas presidential threshold dan kedaulatan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memunculkan perdebatan serius dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks yurisdiksi hukum tata negara, kebijakan ini dianggap mengandung implikasi yuridis terhadap pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat karena membatasi partisipasi politik yang seharusnya terbuka dan inklusif.

Menurut Hapsari dan Saraswati (2023), kebijakan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya berpotensi mempersempit pilihan rakyat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menyebabkan pemilu tidak lagi sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Fathurrahman (2024) menambahkan bahwa secara yuridis, keberadaan presidential threshold tidak memiliki dasar eksplisit dalam UUD 1945, yang artinya norma tersebut hanya bersifat kebijakan terbuka (*open legal policy*) legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terutama Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017—telah mempertahankan konstitusionalitas threshold, namun tidak serta-merta menjawab problematika substantif terkait keadilan pemilu dan kesetaraan akses politik.

Boediningsih dan Sulistiono (2023) dalam kajiannya mengemukakan bahwa threshold justru memperkuat dominasi oligarki politik, di mana partai besar cenderung memonopoli pencalonan presiden. Ini bertentangan dengan gagasan demokrasi inklusif yang menjamin setiap kekuatan politik memperoleh peluang setara dalam kontestasi elektoral.

Sementara itu, Ghoffar (2018) melalui analisis komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem presidensial yang kuat cenderung tidak menggunakan ambang batas dalam pencalonan presiden, justru membiarkan masyarakat secara luas menentukan legitimasi politik calon melalui pemilu langsung.

Penelitian oleh Wijaya dan Erwinta (2020) menunjukkan bahwa secara praktis, presidential threshold menutup peluang bagi munculnya alternatif kepemimpinan nasional karena hanya partai-partai tertentu yang memenuhi syarat pencalonan. Hal ini mengakibatkan stagnasi politik dan keterputusan aspirasi publik dari proses politik nasional.

Munarwan dan Novita (2021) bahkan menilai bahwa penerapan threshold telah menjadi alat kepentingan oligarki dan penyumbang utama polarisasi politik di Indonesia, di mana perdebatan tidak lagi berdasarkan program atau gagasan, melainkan persekutuan elite politik.

Dari aspek hak asasi, Sari dan Desiandri (2023) menekankan bahwa pembatasan pencalonan melalui threshold merupakan bentuk pembatasan hak politik warga negara yang tidak proporsional, dan berpotensi melanggar prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam perspektif historis, kebijakan ambang batas ini awalnya bertujuan untuk mendorong sistem pemerintahan yang stabil dan memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen. Namun, dalam praktiknya, justru telah meminggirkan hak-hak konstitusional warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur partai kecil atau partai baru. Hal ini menimbulkan konflik antara asas efektivitas pemerintahan dan asas demokrasi partisipatif.

Lebih jauh, efek sistemik dari kebijakan ini terlihat dalam terbatasnya jumlah calon presiden yang tersedia pada setiap pemilu, yang berdampak pada rendahnya diversitas gagasan dan visi yang ditawarkan kepada pemilih. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang kompetitif dan mencerdaskan kehidupan politik bangsa, sebagaimana dikehendaki dalam nilai-nilai demokrasi substantif.

Beberapa kajian lain seperti oleh Ernasari dan Rakhmatika (2021) juga menekankan bahwa presidential threshold berdampak langsung pada kemunduran kualitas demokrasi, khususnya dalam aspek representasi politik. Masyarakat yang tidak terwakili oleh partai-partai besar menjadi kehilangan saluran demokratis untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam pemilu presiden.

Mahkamah Konstitusi, meskipun konsisten mengakui threshold sebagai domain pembentuk undang-undang, seharusnya dapat mengevaluasi kembali pendekatan ini dengan mempertimbangkan asas-asas demokrasi konstitusional yang lebih luas. Dalam beberapa pendapat berbeda (*dissenting opinion*), hakim konstitusi juga telah menyuarakan bahwa keberadaan threshold dalam pemilu serentak tidak lagi relevan dan bahkan bertentangan dengan semangat pemilu langsung yang berdaulat di tangan rakyat.

Dengan mempertimbangkan semua kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif yuridis maupun demokratis, presidential threshold lebih banyak menimbulkan kerugian terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Maka, perlu adanya evaluasi kebijakan dan reformasi regulasi pemilu guna menghadirkan sistem yang lebih adil, setara, dan terbuka bagi seluruh elemen bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur hukum dan pandangan akademis, dapat disimpulkan bahwa penerapan presidential threshold dalam sistem pemilu presiden di Indonesia menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah membatasi hak konstitusional warga negara dan mempersempit pilihan politik rakyat dalam memilih pemimpin nasional secara langsung.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengakui kebijakan ini sebagai ranah pembentuk undang-undang (open legal policy), sejumlah kritik menyatakan bahwa keberadaan threshold bertentangan dengan semangat demokrasi inklusif dan partisipatif. Pemilu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat seharusnya memberikan ruang yang setara bagi seluruh kekuatan politik untuk mencalonkan diri, tanpa dibatasi oleh ambang batas yang hanya menguntungkan partai-partai besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antamaeng, I. V. (2019). Implikasi presidential threshold terhadap pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 7(3), 13–22.
- Boediningsih, W., & Sulistiono, S. (2023). Konsep kedaulatan rakyat dalam implementasi presidential threshold pada sistem pemilihan umum secara langsung di Indonesia. *Tinjauan Yuridis*, 12(2), 45–60.
- Ernasari, N., & Rakhamatika, D. (2021). Dampak penerapan presidential threshold terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2), 329–340.
- Fathurrahman, F. (2024). Relevansi sistem presidential threshold pemilu di Indonesia dalam perspektif pembaharuan hukum. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(1), 25–38.
- Ghoffar, A. (2018). Dispute on presidential threshold: Decisions of the Constitutional Court and other countries' experiences. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480–501.
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak pelaksanaan presidential threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 54–68.
- Herjunanto, D. H., & Sulaksono, S. H. (2023). Presidential threshold sebagai open legal policy dalam hak untuk dipilih dan memilih calon presiden dan wakil presiden. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(1), 112–128.
- Munarwan, A., & Novita, A. (2021). Analisis terhadap presidential threshold dalam kepentingan oligarki. *Jurnal Rechten*, 3(2), 22–30.
- Rahmawati, Y. (2023). Analisis sistem presidential threshold terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Jambi.
- Sari, T. P., & Desiandri, Y. S. (2023). Politik dan HAM: Analisis yuridis regulasi presidential threshold pemilihan calon presiden di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 89–104.
- Sayogo, A. B. (2018). Presidential threshold berdasarkan perolehan suara pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dalam perspektif kedaulatan rakyat [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Wijaya, A., & Erwinta, P. (2020). Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 16(1), 45–54.